

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *SEXTORTION* BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK )**

**Oleh :**

**Muhammad Al Ghifary Hasbani**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis digital. Salah satu kejahatan yang berkembang adalah *sextortion*, yaitu pemerasan atau pengancaman dengan menggunakan konten intim melalui sarana elektronik. Kejahatan ini tidak hanya menyerang kehormatan dan martabat korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius serta berpotensi menyebar luas melalui media digital. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *sextortion* berbasis media elektronik serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung guna memperoleh pandangan praktis dan akademis terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian dan pembahasan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sextortion* dibangun melalui pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjek hukum, unsur kesengajaan dan tanpa hak, serta unsur perbuatan mendistribusikan atau mengancam penyebaran informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman. Selain itu, hakim menilai adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta tidak ditemukannya

***Muhammad Al Ghifary Hasbani***

alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Secara filosofis, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi nilai-nilai moral dan martabat manusia. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban serta akibat yang ditimbulkan terhadap ketertiban masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai *sexortion* dalam sistem hukum pidana Indonesia guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan sensitivitas terhadap perlindungan korban, khususnya dalam mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan berbasis digital, serta mengembangkan kebijakan pemidanaan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, *Sextortion*, Media Elektronik.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ELECTRONIC-BASED SEXTORTION CRIMES (STUDY OF COURT DECISION NO.1056/PID.SUS/2024/PN TJK )**

**By :**

**Muhammad Al Ghifary Hasbani**

*The rapid development of information and communication technology has significantly transformed social interaction patterns, including the emergence of new forms of cyber-based crimes. One of the growing crimes in the digital era is sextortion, defined as extortion or threats carried out through the misuse of intimate content via electronic media. This crime not only violates the victim's dignity and personal integrity but also causes serious psychological and social harm, with the potential for widespread digital dissemination. The problems addressed in this research are how criminal liability is imposed on perpetrators of sextortion committed through electronic media and what judicial considerations underlie the imposition of criminal sanctions.*

*This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach is conducted through literature review of statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly works concerning criminal liability and cybercrime. The empirical approach is carried out through field research, including interviews with a judge of the Tanjungkarang District Court and a criminal law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung, in order to obtain practical and academic perspectives on the construction of criminal liability and judicial reasoning. The collected data are analyzed qualitatively to examine the implementation of legal norms in judicial practice.*

*The results of the research indicate that criminal liability for sextortion is established through the cumulative fulfillment of the elements of the offense, including the existence of a legal subject, the element of intentional and unlawful conduct, and the act of distributing or threatening to distribute electronic information containing extortion or threats. The court further assessed the presence of mens rea in the form of intent, the perpetrator's capacity for criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds. In imposing the sentence, the court considered juridical,*

**Muhammad Al Ghifary Hasbani**

*philosophical, and sociological aspects, including the psychological and social impact, suffered by the victim, thereby reflecting that punishment serves not only a retributive function but also preventive and protective purposes. The basis of the judge's consideration in imposing a sentence is grounded in juridical, philosophical, and sociological aspects. From a juridical perspective, the judge considers the fulfillment of the elements of the offense based on legally admissible evidence. From a philosophical perspective, punishment is viewed as a means to achieve justice, provide a deterrent effect, and protect moral values as well as human dignity. From a sociological perspective, the judge takes into account the psychological and social impact experienced by the victim, as well as the consequences for public order, so that sentencing is not merely oriented toward retribution but also toward prevention and the protection of society.*

*This research recommends the strengthening of regulations that specifically address sextortion within the Indonesian criminal law system in order to ensure greater legal certainty. Furthermore, law enforcement authorities are encouraged to enhance victim-oriented approaches, particularly in acknowledging the psychological and social consequences of digital-based crimes, and to develop sentencing policies that balance legal certainty, justice, and social utility.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Sextortion, Electronic Media.*